

---

## **LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA TAHUN 2017**

### **PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

#### **I RUANG LINGKUP TATA KELOLA**

##### **1 PENGERTIAN TATA KELOLA**

Tata Kelola BPR adalah suatu tata kelola perusahaan yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness) dalam melaksanakan aktivitas usahanya.

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar tata kelola dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

Tata Kelola BPR menunjukkan pola hubungan antara Manajemen dengan stakeholders, Manajemen dengan Dewan Komisaris dan antar Manajemen yang didasarkan pada etika dan nilai budaya perusahaan yang ditunjang oleh suatu sistem, proses, pedoman kerja dan organisasi untuk mencapai kinerja yang maksimal

Struktur Tata Kelola PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Tata kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan Laporan publikasi PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara posisi 31-12-2017 dapat diinformasikan bahwa Total Asset BPR adalah sebesar Rp.18.488.209,- ribu, sedangkan Modal Inti BPR terinformasi sebesar Rp.3.845.955,- ribu. Besaran asset dan modal inti serta kompleksitas usaha BPR dimaksud menentukan pengelolaan dan penilaian penerapan tata kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara selanjutnya.

## **2 TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA**

- Meningkatkan Kinerja dan efisiensi BPR
- Melindungi kepentingan stakeholder
- Meningkatkan kepatuhan manajemen dan kepatuhan terhadap Peraturan OJK dan Perundang-Undangan yang terkini dan relevan
- Meningkatkan kesungguhan Manajemen dalam menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan BPR
- Menarik minat dan kepercayaan

## **3 PRINSIP-PRINSIP TATA KELOLA PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

Prinsip-prinsip Tata Kelola di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara sesuai Peraturan OJK No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola bagi BPR didasarkan pada 5 (lima) prinsip penerapan Tata Kelola perusahaan yang meliputi :

### **1 Transparency (Keterbukaan)**

- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.
- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku
- BPR mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders)
- BPR mengungkapkan informasi yang meliputi tetapi tidak terbatas pada visi, misi, strategi BPR, kondisi keuangan dan non keuangan BPR, susunan Direksi dan Dewan Komisaris, kepemilikan saham, remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris, pemegang saham pengendali, pengelolaan risiko, sistem pengawasan dan pengendalian intern, penerapan fungsi kepatuhan, sistem dan

implementasi tata kelola serta informasi dan fakta material.

- Prinsip keterbukaan tetap memperhatikan ketentuan rahasia BPR, rahasia jabatan dan hak-hak pribadi sesuai peraturan yang berlaku

## **2 Accountability**

- BPR menetapkan sasaran usaha dan strategi untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders
- BPR menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi masing-masing organ anggota Dewan Komisaris, dan Direksi serta seluruh Jajaran di bawahnya yang selaras dengan visi, misi, nilai-nilai Perusahaan, sasaran usaha dan strategi BPR
- BPR harus meyakini bahwa masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun seluruh Jajaran di bawahnya mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami perannya dalam pelaksanaan tata kelola BPR
- BPR memiliki ukuran kinerja dari semua Jajaran BPR berdasarkan ukuran yang disepakati secara konsisten dengan nilai perusahaan (Corporate Culture Values), sasaran usaha dan strategi BPR serta memiliki rewards and punishment system

## **3 Responsibility**

- BPR berpegang pada prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Principles) dan menjamin kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
- BPR sebagai bagian dari masyarakat peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial secara wajar

## **4 Independency**

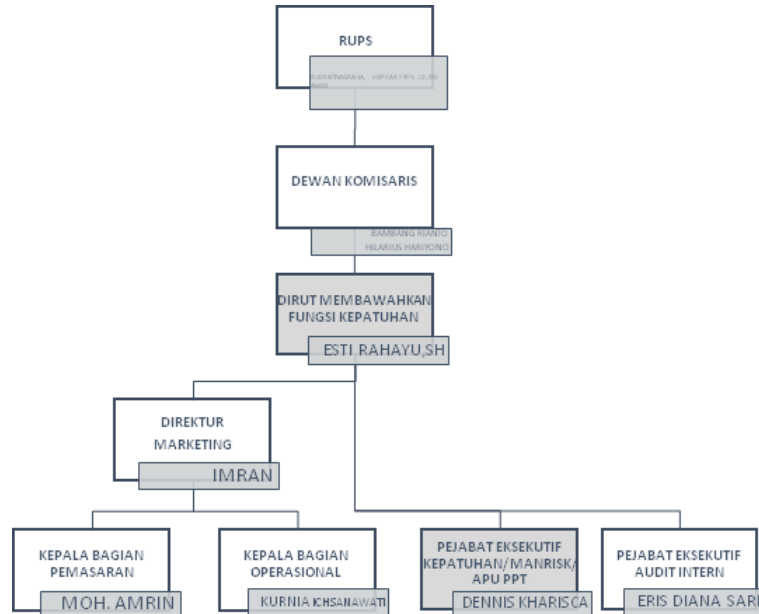
- BPR menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders manapun dan tidak terpengaruh oleh Kepentingan sepihak serta terbebas dari benturan kepentingan (conflict of interest)
- BPR mengambil keputusan secara obyektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun

## **5 Fairness**

- BPR memperhatikan kepentingan seluruh stakeholders berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran
- BPR memberikan kesempatan kepada seluruh stakeholders untuk

memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan BPR serta membuka akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan

## II STRUKTUR ORGANISASI PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA



## III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

### 1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DIREKSI

Susunan Anggota Direksi PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No. 14 tanggal 23 Februari 2017 pada Notaris Ermin Yuniastuti,SH adalah sebagai berikut :



Nama : Esti Rahayu, SH  
Jabatan : Direktur Utama  
Tempat/Tanggal Lahir : Pacitan/4-11-1968  
Pendidikan Terakhir : S-I Hukum Universitas Jember  
Lama Jabatan : 3 tahun  
Sertifikasi Komisaris : 65100 12106 3371 2016  
Masalaku : 29-12-2021  
Pengalaman Kerja Terakhir : Direktur Utama PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara



Nama : Imran, S.Sos  
Jabatan : Direktur  
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta/29-10-1967  
Pendidikan Terakhir : S-1 Sospol Administrasi Negara STIE Karya Darma Papua  
Lama Jabatan : 3 tahun  
Sertifikasi Komisaris : 65100 12106 1260 2015  
Masalaku : 13-7-2020  
Pengalaman Kerja Terakhir : Direktur PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara

**Keterangan:**

Seluruh anggota Direksi PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Direksi. sesuai dengan surat Bank Indonesia No. 15/23/DKBU/PLBPR/Sb/Rahasia tanggal 3 April 2013 dan Keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/15/KEP.GBI/Sb/2013/RAHASIA tentang hasil penilaian kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) an. Esti Rahayu , dan surat Bank Indonesia No.15/72/DPIP/PBPR/Sb/Rahasia tanggal 16 Desember 2013 perihal surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.15/50/KEP.GBI/Sb/2013/RAHASIA tentang hasil uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) an. Imran

**2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan

3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern, fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### **3 TINDAK LANJUT TERHADAP REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS**

1. Direksi telah mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Direksi telah meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Direksi telah memberikan perhatian kepada proses-proses operasional yang memiliki potensi risiko tinggi akibat human error agar dievaluasi dan dimitigasi dengan memanfaatkan sarana sistem
4. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi telah mendapat perhatian serius dari Direksi
5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, Direksi telah mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

### **4 KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI**

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Direksi PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI						
		PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara	BPR Toelangan Dasa Nusantara	BPR Toeloe ngredjo Dasa Nusantara	BPR Tjoekir Dasa Nusantara	BPR Artha Berkah Cemerlang	BPR Lumbung Artha Muntila nindo	BPRS Margirizki
1	Esti Rahayu, SH	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Imran, S.Sos	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, DEWAN KOMISARIS DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

**1. HUBUNGAN KEUANGAN**

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Esti Rahayu, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Imran, S.Sos	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

**2. HUBUNGAN KELUARGA**

NO	NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DIREKSI LAIN	DEWAN KOMISARIS	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Esti Rahayu, SH	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Imran, S.Sos	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

**IV PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

**1 JUMLAH DAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS**

Susunan Anggota Dekom PPT. BPR Toelangan Dasa Nusantara per 31-12-2017 berdasarkan Akta Perubahan Pengurus BPR yang terakhir No 14 tanggal 27 Agustus 2015 pada Notaris Ermin Yuniastuti,SH adalah sebagai berikut :



Nama : Drs. Bambang Rianto  
Jabatan : Komisaris Utama BPR Toelangan DN  
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/28-11-1957  
Pendidikan Terakhir : S-1 Ekonomi Universitas Putra Bangsa  
Lama Jabatan : 3 tahun  
Sertifikasi Komisaris : 65100 12106 2716 2016  
Masalaku : 19-12-2021  
Pengalaman Kerja Terakhir : - Komisaris Utama PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara  
- Komisaris PT. BPR Artha Seruni Pasuruan  
- Komisaris PT. BPR Artha Buana Krian Sidoarjo



Nama : Hilarius Hariyono, S.Si  
Jabatan : Komisaris BPR Toelangan DN  
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta/1-1-1961  
Pendidikan Terakhir : S-1 MIPA Universitas Kristen Emmanuel Yogyakarta  
Lama Jabatan : 3 tahun  
Sertifikasi Komisaris : 65100 12106 127 2013  
Masalaku : 11-2-2018  
Pengalaman Kerja Terakhir : - Komisaris PT.BPR Toelangan Dasa Nusantara  
- Komisaris Utama PT. BPR Toeloengrejo DN

**Keterangan:**

Seluruh anggota Dekom PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan serta telah memiliki Sertifikasi Dekom. Sesuai dengan surat dari OJK no. SR-33/KR.313/2015 perihal penyampaian hasil uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-27/KR.31/2015 tentang hasil uji kemampuan dan kepatutan Komisarisn Utama an. Bambang Rianto. dan surat dari OJK No. SR-14/KR.313/2014 perihal penyampaian hasil uji kemampuan dan kepatutan (Fit and Proper Test) dan surat keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-20/KR.31/2014 tentang hasil uji kemampuan dan kepatutan Komisaris an. H. Hariyono.

**2 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.

3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

### **3 REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI**

1. Agar Direksi mengupayakan pertumbuhan kredit yang berkualitas
2. Agar Direksi meningkatkan efisiensi dan pengendalian biaya operasional
3. Agar Direksi menyesuaikan strategi rekrutmen untuk mendapatkan sumber daya manusia yang handal dan kompeten, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang tepat
4. Dengan semakin berkembangnya bisnis BPR, dampak risiko reputasi yang mungkin terjadi perlu mendapat perhatian Direksi
5. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian, agar Direksi BPR perlu mengidentifikasi dan memitigasi risiko secara lebih dinamis

### **4 KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS**

Data dan Informasi Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dan Group Usaha BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS						
		PT. BPR	BPR Toelan	BPR Toeloe	BPR Tjoekir	BPR Artha	BPR Lumbu	BPRS Margiri
		Toelangan Dasa Nusantara	gan Dasa Nusantara	ngredjo Dasa Nusantara	Dasa Nusantara	Berkah Cemerlang	ng Artha Muntilaindo	zki
1	Drs. Bambang Rianto	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
2	Hilarius Hariyono, S.Si	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada

**5 HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DEWAN DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR**

Informasi hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, Dewan Komisaris dan/atau pemegang Saham BPR posisi 31-12-2017 adalah sebagai berikut :

**1. HUBUNGAN KEUANGAN**

NO	NAMA KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs. Bambang Rianto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Hilarius Hariyono, S.Si	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

**2. HUBUNGAN KELUARGA**

NO	NAMA KOMISARIS	HUBUNGAN KELUARGA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM BPR
1	Drs. Bambang Rianto	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan
2	Hilarius Hariyono, S.Si	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan	Tidak ada hubungan

**V KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS-TUGAS KOMITE**

Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp. 80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah) wajib membentuk paling sedikit:

1. Komite Audit
2. Komite Pemantau Risiko
3. Komite Renumerasi dan Nominasi

Pengangkatan anggota Komite sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.

**VI PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS**

Data dan informasi Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara yang telah ditetapkan berdasarkan RUPS tanggal 20 April 2017 adalah sebagai berikut :

**1 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI**

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	162.000
2	Tunjangan	2	45.978
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	mobil dinas dan BPJS Kesehatan
	<b>Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Direksi selama 1 (satu) tahun</b>	<b>2</b>	<b>207.978</b>

**2 PAKET/KEBIJAKAN RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS**

NO	PAKET RENUMERASI DAN FASILITAS LAIN	JUMLAH ORANG	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 TAHUN (dalam ribuan rupiah)
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	114.000
2	Tunjangan	2	22.144
3	Tantiem	2	0
4	Kompensasi berbasis saham	2	0
5	Remunerasi bagi pengurus BPR yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	2	0
6	Fasilitas lain yang diterimatidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	2	sewa rumah , Mobil dinas
	<b>Total Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain yang Diterima Dewan Komisaris selama 1 (satu) tahun</b>	<b>2</b>	<b>136.144</b>

**VII RASIO GAJI TERENDAH DAN TERTINGGI**

Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Adapun rasio gaji terendah dan tertinggi posisi 31-12-2017 di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara adalah sebagai berikut :

NO	RASIO GAJI	SKALA PERBANDINGAN	
1	Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	1,17	1,00
2	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,45	1,00
3	Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,38	1,00
4	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Komisaris terendah	1,45	1,00
5	Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan Pegawai terendah	1,93	1,00

**VIII FREKWENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS**

Data kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris sampai dengan posisi 31-12-2017 berdasarkan daftar absensi kehadiran dan risalah rapat Dewan Komisaris PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara adalah sebagai berikut :

NO	NAMA ANGGOTA DEKOM	JABATAN	JUMLAH RAPAT YANG DISELENGGARAKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI SECARA FISIK	JUMLAH RAPAT YANG DIHADIRI MELALUI TEKNOLOGI TELE KONFERENSI	PERSENTASE KEHADIRAN
1	Drs. Bambang Rianto	Komisaris Utama BPR Toelangan DN	4	4	0	100%
2	Hilarius Hariyono, S.Si	Komisaris BPR Toelangan DN	4	4	0	100%

**Keterangan:**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat

**Topik/Materi Rapat Dewan Komisaris**

- Rencana Bisnis BPR Untuk tahun 2017 adanya peningkatan kinerja baik Operasional maupun kredit, karena hampir seluruh target khususnya kredit yang diberikan dan laba berjalan tahun 2017 tercapai bahkan melebihi rencana bisnis tahun 2017.
- Isu-isu strategis BPR
- Evaluasi /penetapan kebijakan strategis
- Evaluasi Realisasi Rencana Bisnis BPR tercermin untuk pencapaian target di tahun 2017 untuk total aset sebesar Rp.18.488.209,-ribu tercapai sebesar 108% sedangkan dana pihak ke3 tabungan tercapai sebesar 101%, sedangkan deposito tercapai sebesar 85.57%, antar bank pasiva tercapai sebesar 109.41% dan untuk dana antar bank aktiva tercapai sebesar 151.19% , laba berjalan setelah pajak tercapai sebesar 143.95%.

**IX JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD)**

Data jumlah penyimpangan intern (internal fraud) yang terjadi sampai dengan posisi 31-12-2017 di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

INTERNAL FRAUD	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Dalam 1 (satu) tahun	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah diselesaikan		0		0		0		0
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah ditindak lanjuti melalui proses hukum		0		0		0		0

**X JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM PERDATA DAN PIDANA YANG DIHADAPI DAN MASIH DALAM PROSES PENYELESAIAN**

Data jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian sampai dengan posisi 31-12-2017 yang terjadi di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini :

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai(telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	0	0
Dalam proses penyelesaian	0	0

**Keterangan:**

Selama tahun 2017 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BPR.

**XI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Data transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama tahun 2017 di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara:

Adanya benturan kepentingan perihal sewa mobil operasional BPR Toelangan DN , dimana benturan kepentingan ini secara operasional tidak mempengaruhi keuangan BPR.

---

## **XII PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN**

### **1 PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.03/2016 tentang penerapan fungsi kepatuhan, maka PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Kepatuhan

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA KEPATUHAN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN:**

1. Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
2. Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
3. Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan
4. Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain
5. Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan
6. Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR
7. Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR
8. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan adanya pelanggaran terhadap kepatuhan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan
9. Melakukan identifikasi, pengukuran, monitoring, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, berkoordinasi dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko atau Pejabat Eksekutif yang menangani Manajemen Risiko
10. Menganalisis, mengevaluasi, dan menilai risiko kepatuhan yang

berhubungan dengan kegiatan usaha BPR

11. Mengevaluasi prosedur pemantauan dan mengembangkannya secara efektif dan efisien

Adapun aktivitas penerapan fungsi kepatuhan yang dilaksanakan di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara sampai dengan posisi 31-12-2017 antara lain :

- Berdasarkan Laporan Keuangan Publikasi PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara posisi 31-12-2017, dapat diinformasikan bahwa modal inti PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara adalah sebesar Rp.3.845.955,-ribu sehingga masih belum wajib membentuk Komite-komite.
- Mengusulkan penyesuaian Manual, Kebijakan dan Prosedur Internal
- Melakukan pemantauan terhadap tingkat kepatuhan atas ketentuan yang berlaku terkait prinsip prudential banking, seperti KPMM, BMPK dan NPL. sepanjang tahun 2017 secara keseluruhan tidak terdapat pelanggaran terhadap ketentuan terkait prinsip prudential banking
- Melakukan pengkinian database ketentuan yang berlaku
- Melakukan review kepatuhan terhadap pelepasan kredit
- Melakukan compliance review untuk memastikan penerapan APU dan PPT berjalan sesuai ketentuan yang berlaku
- Melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka penilaian Tingkat Kesehatan BPR
- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Penilaian kualitas kinerja untuk menentukan sejauh mana tercapainya tujuan dan sasaran organisasi yang dituangkan dalam rencana bisnis BPR
- Laporan Keuangan PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan

Publik Nugroho dan Rekan sebagai Auditor PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017

- Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi
- Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit
- Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko
- Sistem pengendalian internal

#### **INDIKATOR KEPATUHAN DI TAHUN 2017**

- Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit dan risiko operasional adalah 30.56% berada di atas ketentuan yang berlaku yaitu 12%
- Rasio NPL (net) adalah 3.40 %, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan yang berlaku maksimal sebesar 5% (net)
- Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha
- Komitmen terhadap OJK, Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik

## **2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN DAN EKSTERNAL**

### **1 PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bagi BPR, maka PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Audit Intern.

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA AUDIT INTERN ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN:**

1. Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit
2. Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen

- 3 Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana
- 4 Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen

**Adapun aktivitas pelaksanaan audit intern di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara sampai dengan posisi 31-12-2017 meliputi:**

- Melaksanakan audit terhadap Kantor Pusat, Divisi/Bagian
- Melaksanakan audit proses kredit untuk tetap memelihara kualitas kredit yang baik
- Memperbaharui rencana strategi audit dengan berpedoman pada Rencana Bisnis BPR baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang

**2 PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN**

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik serta dalam rangka tersedianya informasi keuangan yang berkualitas yang merupakan cerminan penerapan tata kelola yang baik, maka :

- Laporan Keuangan PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama
- Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
- Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Nugroho dan Rekan sebagai Auditor PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara untuk melakukan audit atas Laporan

Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017

Adapun KAP yang dipakai PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KAP	NO. PERJANJIAN KERJA	MASA LAKU PERJANJIAN KERJA	KAP TERDAFTAR
2016	Ventje Jansen Royke & Liem	002/TR/KT.01/2017	16-1-2017 s.d. 13-3-2017	Terdaftar di OJK
2017	Nugroho dan Rekan	51/TDN.03/I/4/2018	21-2-2018 s.d. 15-4-2018	Terdaftar di OJK

### 3 **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN RISIKO**

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah menunjuk Pejabat Eksekutif Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko.

#### **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SATUAN KERJA MANAJEMEN RISIKO ATAU PEJABAT EKSEKUTIF PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO:**

- Pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan
- Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi
- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional
- Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru
- Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki
- Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala
- kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko

Adapun aktivitas Penerapan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara mencakup:

1. Laporan Keuangan PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama

2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara untuk melakukan audit telah sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit
3. Sesuai keputusan RUPS PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris.
4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, adapun KAP yang ditunjuk adalah Kantor Akuntan Publik Nugroho dan Rekan sebagai Auditor PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2017

**XIII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)**

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan relevan, antara lain menyangkut aspek Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan BMPK kepada Otoritas Jasa Keuangan telah dilakukan secara rutin dan tepat waktu.

Data penyediaan dana di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat dijelaskan sebagaimana tabel dibawah ini:

NO	PENYEDIAAN DANA	JUMLAH	
		DEBITUR (orang)	NOMINAL (ribuan rupiah)
1	Kepada Pihak Terkait	8	191.002
2	Kepada Pihak Tidak Terkait	912	14.165.511

**Keterangan:**

Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK di PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara

#### **XIV RENCANA BISNIS BPR**

Menyikapi perubahan lingkungan eksternal yang dinamis, PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara senantiasa mengkaji strategi bisnisnya baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara menyusun Rencana Strategis Bank dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.52/SEOJK.03/2016 Tanggal 23 Desember 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat.

##### **RENCANA BISNIS PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA TAHUN 2018**

1. Memperkuat layanan BPR dengan meningkatkan kemudahan, kenyamanan dan keamanan bertransaksi bagi nasabah BPR
2. Meningkatkan penghimpunan dana murah
3. Meningkatkan penyaluran kredit dan fokus pada permintaan kredit yang riil dan sehat
4. Menyempurnakan proses kredit di semua segmen perkreditan
5. Meningkatkan penghimpunan dana murah

#### **XV TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

##### **1 TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

Informasi kondisi keuangan PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

###### **1 Laporan Keuangan Tahunan**

Laporan Keuangan Tahunan mencakup Ikhtisar data keuangan penting termasuk laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja BPR dan keuangan, dan tata kelola perusahaan.

Laporan Keuangan Tahunan BPR telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya, serta permulaan dari tahun komparatif terawal

**2 Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh Direksi dan Dewan Komisaris. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi diumumkan dalam surat kabar pada tanggal 20 April 2018 dan diinformasikan didalam website BPR Toelangan Dasa Nusantara yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan Kantor Pusat BPR.

**3 Laporan Keuangan Bulanan**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan BPR sesuai dengan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan. Selanjutnya, Laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Otoritas Jasa Keuangan

**2 TRANSPARANSI KONDISI NON KEUANGAN PT. BPR TOELANGAN DASA NUSANTARA**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah memberikan informasi mengenai produk PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui website, Hotline Service di No : 031 8856226 atau 031 8850421

**XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, antara lain :

NO	NAMA KEGIATAN	TUJUAN PENGGUNAAN	NILAI NOMINAL (dalam ribuan rupiah)	LEMBAGA PENERIMA
1	Sosialisasi Tabungan Simpajar	Untuk Penghimpunan dana murah dan sumbangan kenaikan kelas bagi siswa berprestasi	1.000	MI Tlasih Tulangan Sidoarjo
1	Sosialisasi Tabungan Simpajar	sumbangan untuk rekreasi pelajar MI Grogol	500	MI Grogol, Tulangan, Sidoarjo
1	Ruwat Desa Tulangan	Sumbangan Ruwat Desa Tulangan	250	Kantor Kelurahan Tulangan Sidoarjo

1	Sosialisasi tabungan simpajar	Sumbangan untuk Sekolah tahun ajaran baru	500	TK Popoh Wonoayu - Sidoarjo
---	-------------------------------	---	-----	-----------------------------

**XVII HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) TAHUN 2017**

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
1,81	Baik	PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara
ANALISIS		
<p>PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan Tata Kelola BPR, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap</li> <li>2. Proses Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian sudah cukup efektif yang didukung oleh struktur yang lengkap</li> <li>3. Hasil Tata Kelola berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang lengkap</li> </ol>		

---

**XVIII PENUTUP**

Sehubungan dengan adanya Laporan penerapan Tata Kelola (GCG), diharapkan dapat digunakan untuk kepentingan stakeholders, meningkatkan kinerja BPR dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan.

Demikian kami sampaikan laporan penerapan tata kelola (GCG) PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara selama tahun 2017, kami mengharapkan petunjuk dan pengarahan dari semua pihak, agar PT.BPR Toelangan Dasa Nusantara dapat berkembang dengan baik dan bisa memenuhi dan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Sidoarjo, 23 April 2018

Pengurus PT. BPR Toelangan Dasa Nusantara

**Esti Rahayu, SH**  
Direktur Utama



**Drs. Bambang Rianto**  
Komisaris Utama